



**Guiding the Heart of People
from Age to Age**

Timeless Wisdom

EDITOR

Agus Widodo

Bernadus Dirgaprimawan

TIMELESS WISDOM

Guiding the Heart of People from Age to Age

1025001003

©2025 PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS

Anggota SEKSAMA Penerbit Katolik Indonesia

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.co.id

Website : www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke- 5 4 3 2 1

Tahun 29 28 27 26 25

Penulis : Agus Widodo, Bernadus Dirgaprimawan, Albertus Purnomo, Gregorius Tri Wardoyo, Surip Stanislaus, Martin Harun, Josef Ferry Susanto, Antonius Galih Arga Wiwin Aryanto, R.F. Bhanu Viktorahadi, Bobby Steven Octavianus Timmerman, Daniel K. Listijabudi, Edison R.L. Tinambunan, Albertus Bagus Laksana, Leonardus Tri Purnanto, Y.B. Prasetyantha, Martinus Joko Lelono, Heru Prakosa, Onesius Otenieli Daelli, C.B. Mulyatno, Markus Budi Raharjo, Dionius Bismoko Mahamboro

Editor : Agus Widodo, Bernadus Dirgaprimawan

Desainer : Hermanus Yudi

Nihil Obstat : E. Martasudjita, Pr
Yogyakarta, 17 Januari 2025

Imprimatur : F.X. Suglyana, Pr. - Vikjen. KAS
Semarang, 24 Januari 2025

ISBN 978-979-21-8233-0

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diortak oleh PT Kanisius Yogyakarta

Kebijaksanaan akan Memelihara Engkau (Amsal 2:11)

Pengantar Editor

Agus Widodo & Bernadus Dirgaprimawan

Tema "Kebijaksanaan Akan Memelihara Engkau" diangkat untuk menjawab tantangan zaman yang ditandai dengan kecepatan dan ketergesaan. Hadirnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), seperti *DeepSeek*, *ChatGPT*, *Wordtune*, *JasperAI*, dan lain-lain, telah mempercepat akses informasi, tetapi juga membawa kita pada godaan pola pikir instan. Dampaknya, keengganan berpikir terjadi, dan karenanya, kebiasaan untuk berpikir kritis kurang terlatih. Banyak keputusan yang kemudian dihasilkan secara impulsif. Dalam konteks ini, ajakan untuk hidup bijaksana terasa begitu mengena. Kita diingatkan untuk berpikir lebih dalam sebelum bertindak, dan menjadikan setiap keputusan sebagai bentuk tanggung jawab. Di sinilah, Amsal 2:11 berbicara "kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau." Di ayat tersebut, kebijaksanaan diungkapkan dengan istilah Ibrani yang lebih spesifik yakni *māzimmā* (diskresi), sebuah ekspresi lain dari kata *ḥokmā* (hikmat). *Māzimmā* menekankan pentingnya kehati-hatian, pola pikir yang disiplin, kesabaran berproses, dan pertimbangan yang matang.

Daftar Isi

Kebijaksanaan akan Memelihara Engkau (Ams 2:11) Pengantar Editorial <i>Agus Widodo & Bernadus Dirgaprimawan</i>	iii	Bersikap Bijaksana terhadap Harta Kekayaan dan Barang-Barang Duniawi menurut Agustinus Dari Hippo <i>Agus Widodo</i>	187
Daftar Isi	viii	Mengenakan Jubah Kebijakan: Implementasi Regula Pastoralis Gregorius Magnus dalam Hidup Gembala <i>Edison R.L. Tinambunan</i>	205
Torah Sebagai Penuntun Ilahi <i>Albertus Purnomo</i>	1	Kebijaksanaan dan Moralitas: Menggugat Peran Intelektual dalam Kultur Akademis Indonesia Kontemporer <i>Albertus Bagus Laksana</i>	225
Ajaran Orang Bijak adalah Sumber Kehidupan (Amsal 13:14): Sebuah Penggambaran Metaforis <i>Bernadus Dirgaprimawan</i>	19	Rekonstruksi Sejarah: Menemukan Pesan Pembebasan Bagi Perempuan dari Teks-Teks Dominatif Alkitab dalam Pemikiran Elisabeth Schüssler Fiorenza <i>Leonardus Tri Purnanto & Y.B. Prasetyantha</i>	243
Kebijaksanaan dalam Kitab Ayub <i>Gregorius Tri Wardoyo</i>	31	Poskolonialisme: Bijaksana Memandang Diri Sendiri <i>Martinus Joko Lelono</i>	267
Segala Sesuatu Sia-Sia & Usaha Menjaring Angin <i>Surip Stanislaus</i>	45	Kebijaksanaan sebagai Arah Pendidikan demi Harmoni Sosial dalam Masyarakat Plural: Belajar dari Hazrat Inayat Khan dan Sri Aurobindo <i>Heru Prakosa</i>	281
Yesus sebagai Satunya Guru dan Sang Hikmat dalam Injil Matius <i>Martin Harun</i>	69	<i>Ya'ahowu</i> : Salam Khas untuk Bersaudara dan Berbagi Berkat <i>Onestus Otenieli Daeli</i>	309
Siapa yang Bertelinga Hendaklah Mendengar (Hikmat dalam Perumpamaan Yesus) <i>Josef Ferry Susanto</i>	97	Pemikiran Agustinus tentang Kebijakan dalam Penafsiran Jacques Maritain <i>C.B. Mulyatno</i>	323
Kristologi Kebijakan Allah dalam Prolog Yohanes 1:1-5 <i>Antonius Galih Arga Wiwin Aryanto</i>	117	Menuju Manusia Purna <i>Murkus Budiraharjo</i>	347
Kebijaksanaan Ilahi yang Mentransformasi Paulus <i>R.F. Bhanu Viktorahadi</i>	133	Daur Ulang Barang Lawasan <i>Dionius Bismoko Mahamboro</i>	361
Kebijaksanaan dalam Keluarga Kudus <i>Bobby Steven Octavianus Timmerman</i>	149	<i>Curriculum Vitae</i> Dr. V. Indra Sanjaya Tanureja, Pr., Lic.S.S.	375
Kitab Suci dan Tradisi Lokal <i>Daniel K. Listijabudi</i>	165	Daftar Karya Publikasi Dr. V. Indra Sanjaya Tanureja, Pr., Lic.S.S.	376
		Para Penulis	383

- Hoyos, Castrillón. *Ibadat Harian*. Ofisi Baru Menurut Ritus Roma Diterbitkan oleh PWI-Liturgi. Ende: Penerbit Nusa Indah – Percetakan Arnoldus, 1982.
- Hoyos, Castrillón. *Misa Santo Santa III, September – Desember*. Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Libero, Giuseppe de. *La Regola Pastorale*. Versione e Silloge di F. Fornasari SSP. Roma: Paoline, 1941.
- McGrath-Merkle, Clare. "Gregory the Great's Metaphor of the Physician of the Heart as a Model for Pastoral Identity." *Journal of Religion and Health* 50(2), 2011: 374-388.
- Regnault, Lucien. *The Day-to-Day Life of the Desert Fathers in Fourth-Century Egypt*. Translated by Étienne Poirier. Petersham: St. Bede's Publications, 1998.
- Simonetti, Manlio. *Allegoria (Tipologia)*, in *Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane*, diretto da Angelo di Berardino, 140-141. Genova: Marietti, 1994.
- Simonetti, Manlio. *Interpretation in the Early Church, An Historical Introduction to Patristic Exegesis*. Translated by John A. Hughes, Edited by Anders Bergquist and Markus Bockmuehl, William Horbury. Edinburgh: T&T Clark, 1994.

Kebijaksanaan dan Moralitas: Menggugat Peran Intelektual dalam Kultur Akademis Indonesia Kontemporer

Albertus Bagus Laksana

*Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan,
di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya,
di atas tembok-tembok ia berseru-seru,
di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya.*
(Amsal 1:20-21)

Pengantar

Dalam perjalanan sejarah, kaum intelektual atau inteligensia adalah kaum cerdas cendekia dan bijak bestari yang memiliki panggilan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan bahkan kebijaksanaan, tetapi juga keterlibatan transformasional bagi masyarakat dan seluruh kemanusiaan. Bagi kaum bijak bestari ini, tugas mengembangkan olah pikir tak bisa dilepaskan dengan olah rasa, nurani, dan tindakan bela rasa. Dalam ramuan panggilan mulia ini, ada perpaduan antara kebijaksanaan dan kenabian. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah: Apakah Indonesia masih memiliki kaum intelektual seperti ini, termasuk di kampus-kampus yang jumlahnya ribuan itu? Apakah "hikmat" masih bergema dan berseru-seru di kampus-kampus kita, seperti yang dikatakan Kitab Amsal di atas? Ataukah kita justru sedang mengalami krisis intelektualitas dan kececekiawanan, bahkan krisis "kebijaksanaan"? Lalu, di hadapan pelbagai tantangan baru dan unik

yang lahir di era perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), kita juga bertanya: etika, keutamaan, dan kebijaksanaan semacam apa perlu dimiliki oleh para akademisi dan intelektual?

Guru Besar Abal-Abal

Untuk menyadarkan kita akan persoalan intelektualitas, kebijaksanaan, dan integritas di dalam kultur pendidikan tinggi kita, mungkin kita bisa menengok perkara carut-marut pengurusan jabatan akademik guru besar yang amat memprihatinkan sekaligus membuka mata kita terhadap kenyataan ini.

"Status ini akan membuat keluarga dan teman-teman saya bangga," begitu kata seorang politisi senior, Bambang Soesatyo, yang juga sedang menjabat ketua MPR RI, seperti dikutip oleh Majalah *Tempo* (Edisi 8-14 Juli 2024). Politisi ini sedang berbicara mengenai jabatan guru besar. Ia memang tidak dikenal luas sebagai dosen atau akademisi selama ini, dan baru lulus program doktor dari Universitas Padjajaran tahun 2023. Ini berarti, ia tidak memiliki kiprah dan komunitas keilmuan yang jelek dikenal publik yang mendasari permohonan menjadi guru besar, selain belum memenuhi beberapa syarat yang diperlukan untuk pengajuan guru besar. Maka, terdengar janggal bahwa sang politisi ini ternyata sedang mengurus jabatan guru besar. Seperti dilaporkan Majalah *Tempo* tersebut, ada politisi lain, seorang Sekretaris Jenderal partai besar, juga berambisi meraih guru besar dan sudah berhasil. Investigasi Majalah *Tempo* menemukan bahwa telah terjadi praktik-praktik janggal dan melanggar aturan dalam pengurusan dan pengabulan gelar guru besar untuk para politisi dan sejumlah akademisi, termasuk keterlibatan asistennya di Kementerian Pendidikan.

Publik mungkin tidak terlalu kaget lagi dengan investigasi Majalah *Tempo* itu. Sebab, peristiwa ini adalah bagian dari rentetan persoalan integritas yang telah mendera dunia pendidikan tinggi kita selama

beberapa tahun terakhir. Amat merisaukan melihat data mengenai keterlibatan banyak akademisi kita dalam praktik-praktik yang tidak berintegritas, mulai dari plagiarisme, manipulasi kepengarangan, dan ketidakjujuran dalam kelulusan program doctoral dan pengurusan jabatan akademik dosen. Sebagai akibat dari ketidakjujuran sebagian guru besarnya, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sebuah PTN besar di Banjarmasin, diturunkan statusnya, dari status A ke C, dan para guru besar yang terlibat dibatalkan kenaikan jabatan guru besarnya; sejumlah guru besar lain masih diselidiki. Menarik bahwa para dosen yang terlibat ini menggugat: kenapa hanya mereka dan kampus mereka yang ditindak? Gugatan atau komentar seperti ini memang makin tidak menunjukkan integritas mereka, dan lebih terdengar sebagai sikap "*playing victim*." Tetapi sekaligus menunjukkan parahnya persoalan integritas akademik dan rendahnya "kebijaksanaan" di banyak kampus kita.

Makin menyedihkan bahwa serial kegaduhan ini ternyata tidak memberikan efek jera dan kehati-hatian di dunia akademis kita. Pada 17 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia, politisi dan menteri ESDM yang sedang sibuk berpolitik dan baru saja merebut kursi Ketua Umum Golkar dalam manuver politik yang mengagetkan publik, ternyata berhasil mempertahankan disertasi doctoralnya di Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Bahlil menjadi "fenomena" karena menyelesaikan studi doktor dalam waktu kurang dari dua tahun dan mempublikasikan artikel di jurnal predator. Dicurigai bahwa Bahlil dibantu oleh asistennya untuk menyelesaikan studi dan disertasi ini. Kejadian ini menjadi kontroversi baru mengenai kultur akademis perguruan tinggi Indonesia. Para dosen dan guru besar UI sangat prihatin dan sejumlah dosen UI menyusun petisi untuk memeriksa kembali seluruh proses disertasi Bahlil.

Kegemparan kasus "doktor" Bahlil sebenarnya sudah didahului beberapa hari sebelumnya oleh kasus "doktor" Raffi Ahmad. Artis yang

sangat populer dan menjadi motor pendukung Capres Prabowo - Gibran ini mendapatkan gelar doktor *honoris causa* dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang ternyata tidak punya legalitas di Indonesia dan tidak terbukti melakukan kegiatan akademis yang autentik, apalagi memiliki program doktor yang *reputable* sehingga sah untuk memberikan gelar doktor *honoris causa*. Belakangan, Raffi mendapatkan posisi Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. UIPM mengklaim diri sebagai lembaga pendidikan internasional yang terafiliasi dengan PBB. Dengan segala absurditasnya, mungkin masih bisa dipahami bahwa lembaga dengan reputasi akademis remang-remang seperti ini nekat memberikan gelar doktor *honoris causa* untuk seorang artis dalam bidang "ilmu" yang tak kalah kaburnya: "Event Management and Global Digital Development." Namun, bagi banyak orang, sungguh amat mengejutkan bahwa PTN seperti Universitas Indonesia nekat meluluskan Bahlil dengan cara seperti itu, sebuah proses yang dicurigai penuh dengan kelindan kepentingan politis dan ekonomi. Ternyata promotor Bahlil adalah komisaris independen di Jasa Marga.

Fenomena yang aneh dan memprihatinkan ini membuat kita bertanya: Mengapa persoalan etika dan integritas akademik ini terus mendera pendidikan tinggi kita? Apa yang sesungguhnya terjadi di antara para akademisi dan para politisi dan pesohor pemburu gelar itu? Apakah persoalan ini melulu berhubungan dengan hasrat ekonomis yang terjadi dalam konteks tata kelola perguruan tinggi di tanah air yang masih carut marut, ataukah ada lapisan kultural tertentu yang melatarbelakangi fenomena aneh ini? Tentu saja persoalan ini bersifat struktural dan berhubungan erat dengan sistem pengaturan perguruan tinggi kita. Namun, dibandingkan negara-negara maju, jelas bahwa persoalan integritas akademis di negeri kita ini juga terhubung dengan ambiguitas makna dan fungsi gelar dan jabatan fungsional akademik. Ambiguitas dan ketegangan ini terjadi antara satu kutub makna akademis yang lebih

bersifat ilmiah dan universal, di satu sisi, dan kutub makna kultural yang memiliki konteks yang unik dalam sejarah modernisasi Indonesia. Ambiguitas inilah yang melahirkan figur-figur yang "bijaksana" tetapi disertai dengan kepalsuan-kepalsuan yang makin terkuak.

Residu Mentalitas Priayi

Sejarawan Perancis, Denis Lombard, dalam karyanya *Nusa Jawa: Silang Budaya*, sebetulnya telah mencatat sebuah fenomena aneh dalam dinamika modernisasi (dalam arti "Pembaratan") masyarakat Indonesia terutama lewat dunia akademis (perguruan tinggi dan universitas) dan angkatan bersenjata. Kedua lembaga ini, universitas dan angkatan bersenjata, tidak pernah sungguh menjadi "modern" atau rasional berbasis *merit*. Dalam analisis Lombard, kedua lembaga itu menjadi struktur yang "diimpor" dari Barat dan kemudian dimanfaatkan oleh kaum elite priayi untuk melestarikan prestise dan pengaruh mereka. Di universitas-universitas di Indonesia yang lahir pasca kemerdekaan waktu itu, bentuk-bentuk organisasional dan bahkan terminologi universitas di Barat diikuti dengan sangat setia, bahkan lebih setia daripada di Barat sendiri. Namun, gelar akademis ternyata diperlakukan sebagai bagian dari prestise kebangsawanan yang baru.¹ Gelar dan jabatan akademis dikooptasi menjadi aksesoris sosial dan kultural dari kelompok priayi yang telah kehilangan status tradisional tetapi ingin melestarikan pengaruh sosial kultural mereka.

Dalam arti tertentu, kata-kata Bambang Soesatyo yang disebut di depan mencerminkan mentalitas ini. Baginya, jabatan fungsional guru besar terutama dimengerti sebagai gelar dan status yang menjadi "kebanggaan" keluarga dan teman-teman, bukan sebagai bagian dari proses-proses keilmuan yang autentik dan berdampak. Kalau dulu gelar doktorandus diburu, sekarang gelar sarjana dan bahkan magister tidak

1 Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1996), 123.

cukup; orang mengejar gelar doktor dan kalau bisa jabatan profesor atau guru besar. Jelas, kerusakan publik yang terjadi pun makin besar. Ada inflasi gelar doktor dan jabatan guru besar.

Secara khusus, hasrat para politisi untuk meraih gelar dan jabatan fungsional akademik dengan cara yang lancung menunjukkan sesuatu yang memprihatinkan, yaitu lahirnya intelektual publik yang *ersatz* alias palsu. Para politisi memiliki tugas utama di ranah publik politik. Gelar abal-abal ini tentu saja bagian dari gejala adanya *simulacrum*, kepura-puraan, pencitraan di dunia politik yang dihiasi oleh gelar mentereng akademis tetapi minus pemikiran yang mendalam dan inovatif seperti yang dituntut dari gelar akademis dan jabatan fungsional itu. Tentu saja, amat baik bila dunia politik kita diisi oleh pribadi-pribadi dengan tingkat intelektualitas yang tinggi. Namun kehadiran intelektual *ersatz* ini tidak kelihatan terbukti dengan meningkatnya performa DPR atau MPR. Kualitas naskah akademik RUU, atau perdebatan-perdebatan di DPR, selama ini rasanya belum menunjukkan kualitas ini.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia masih harus berjuang melahirkan intelektual sejati, termasuk intelektual publik, bukan "intelektual *ersatz*" atau intelektual priayi.

Jerat Neoliberalisme

Sekarang ini fenomena "akademisi atau intelektual bermentalitas priayi" bertambah ruwet dengan keinginan kelas menengah yang terdidik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan cara yang tidak wajar. Mekanisme ini dipicu juga oleh ideologi neoliberal yang mulai mendera sistem pendidikan tinggi kita. Menurut Henry Giroux, terutama dalam konteks Amerika, neoliberalisme telah mengubah pendidikan tinggi secara radikal lewat model korporasi, bahkan "McDonaldisasi" pendidikan, di mana lembaga perguruan tinggi mengalami penyeragaman tata kelola, diurus oleh manajer dan birokrat,

bukan oleh pendidik dan intelektual. Secara keilmuan, perguruan tinggi neoliberal didominasi oleh disiplin ilmu sains, teknologi, *engineering*, dan matematika (STEM), sedangkan ilmu humaniora dan sosial tersingkir.² Dalam iklim seperti ini, termasuk di Indonesia, dosen bekerja layaknya pekerja atau buruh, bukan sebagai intelektual atau pemikir, dengan tugas utama memproduksi produk dan layanan, entah itu mata kuliah, proyek riset, publikasi, inovasi, dan program pengabdian. Semua performa ini cenderung diukur dengan matriks produktivitas yang dikuantifikasi dalam model audit dan akreditasi. Produktivitas ini dikejar oleh banyak universitas dan terjadilah formalisasi olah pikiran dan intelektualitas. Pemerintah menjadikan produktivitas ini menjadi target-target terukur untuk kompetisi dengan negara lain demi ranking. Sementara itu, di sektor privat, tumbuh pelbagai perusahaan yang menawarkan jasa "konsultan" yang berbayar untuk pelbagai kepentingan akademis, mulai dari kenaikan jabatan fungsional dosen sampai akreditasi program studi.

Padahal, menyitir pemikiran kritis Giroux, universitas adalah ruang demokratis yang mendidik warga negara (*citizens*), bukan menciptakan konsumen. Universitas memiliki tugas untuk menyediakan fondasi pembinaan kewargaan yang kritis, tercerahkan, dan terlibat. Singkatnya, universitas harus menjadi arena formatif yang membentuk warga negara lewat pedagogi kritis. Dalam hal ini, perguruan tinggi dipanggil untuk mengembangkan imajinasi etis dan sosial. Mahasiswa menjadi pemrakarsa dan pencipta budaya (*cultural producers*) dengan kemampuan menghubungkan kultur populer dan fenomena harian dengan politik dan demokrasi. Dosen mestinya menjadi intelektual publik yang terbiasa dan mahir menghubungkan ilmunya dengan kenyataan dan masalah sosial yang lebih luas. Pendidikan tinggi mestinya mampu menawarkan sebuah visi menyeluruh tentang masyarakat, bukan pengetahuan yang terpecah-pecah.

2 Henry A Giroux, *Neoliberalism's War on Higher Education* (Roseville, MN: Between the Lines, 2014).

Idealisme perguruan tinggi seperti ini sulit terwujud di bawah rezim neoliberal. Menurut Giroux, yang terjadi justru adanya krisis literasi, bukan hanya literasi umum yang juga terus memprihatinkan, tetapi terutama rendahnya literasi kewargaan (*civic illiteracy*), yaitu segala pengetahuan dan kesadaran yang akhirnya membentuk sikap dan keutamaan kewargaan (*civic virtues*) yang bertanggung jawab. Komersialisasi dan komodifikasi pendidikan tinggi beserta dengan adanya praktik-praktik koruptif menunjukkan gejala yang lebih luas bahwa kampus cenderung dihuni bukan oleh *civitas academica* dan warga negara yang bertanggung jawab, tetapi oleh individu konsumen yang bertindak sesuai dengan mekanisme hasrat yang telah terdistorsi. Kapitalisme telah berevolusi dan kekuatannya tidak lagi terutama dalam sistem ekonomi, karena kapitalisme sudah masuk ke dalam wilayah "ontologi", yaitu pembentukan hasrat manusia itu sendiri.³ Kapitalisme telah bergerak dari wilayah ekonomi ke wilayah kultur dan mentalitas yang justru memiliki kekuatan lebih besar untuk membentuk manusia lewat "pendisiplinan" hasrat. Maka, dalam hal ini, kapitalisme atau neoliberalisme telah masuk ke jantung perguruan tinggi, bukan hanya dalam model atau sistem tata kelola perguruan tinggi (misalnya paradigma korporasi yang berorientasi profit), melainkan dalam wilayah hasrat *civitas academica* itu sendiri. Kapitalisme telah berubah menjadi pedagogi, "kurikulum" atau bahkan "sekolah" tersendiri karena membentuk hasrat manusia secara lebih mendalam daripada kurikulum akademis. Hal-hal akademis menjadi produk yang dikonsumsi hasrat dan berhenti di sana, bukan pada pembentukan sikap kewargaan dan tanggung jawab lebih luas. Itulah mengapa gelar akademis menjadi "komoditi" yang dikonsumsi oleh para politisi dan bahkan pesohor, karena menjadi objek hasrat mereka akan kebutuhan pencitraan.

3 Daniel Bell 2001; Deleuze dan Guattari 1983.

Intelektual dan Peran Masyarakat Sipil

Dalam situasi seperti ini, persoalan utamanya bukan hanya komodifikasi dan komersialisasi, melainkan pemiskinan dan kooptasi ilmu dan peran publik dari pengetahuan dan perguruan tinggi, dan hal ini sebetulnya merupakan persoalan yang lebih parah. Dengan demikian, masalah integritas di kalangan akademisi dan perguruan tinggi akhirnya juga melemahkan masyarakat sipil secara umum. Tentu saja, hal ini berakibat sangat buruk dalam situasi di mana masyarakat politis (*political society*) dan korporasi sudah korup juga.

Namun demikian, dalam studi mengenai korupsi, John Girling menemukan bahwa meskipun korupsi itu didorong oleh faktor ekonomi, korupsi juga ditentukan oleh norma-norma politik dan standar dari masyarakat sipil.⁴ Sebagai salah satu pilar dari masyarakat sipil, perguruan tinggi mengemban tugas ini. Dalam hal ini, mutu dan reputasi dosen, termasuk guru besar, mestinya berasal dari reputasi akademis, ilmiah, dan keterlibatan publik, yang diakui oleh kolega-kolega dan masyarakat yang lebih luas. Maka, semestinya para akademisi aktif sebagai intelektual di asosiasi dan forum-forum ilmiah, bukan tiba-tiba muncul sebagai guru besar dengan keahlian dan kontribusi yang diragukan dan belum dikenal publik dan lingkaran akademisnya sendiri. Sesuai dengan peran publik dari universitas, dosen, dan akademisi harus menunjukkan keterlibatan publik nyata, apalagi untuk menjadi guru besar.

Di tengah krisis integritas ini, para akademisi dan intelektual dipanggil untuk minimal menunjukkan standar perilaku yang tidak hanya bersesuaian dengan standar etika dan integritas, tetapi menciptakan "disposisi atau suasana kebatinan publik" (*public moods*) yang mendorong tumbuhnya hidup etis yang lebih luas. Dalam hal ini, menarik memperhatikan apa yang disebut sebagai "*the ethical turn*" oleh para ilmuwan politik. Jane Bennett menulis demikian:

4 Girling, *Corruption, Capitalism, and Democracy* (London and New York: Routledge, 1997), 27.

The ethical turn encouraged political theorists to pay more attention to films, religious practices, news media rituals, neuroscientific experiments, and other noncanonical means of ethical will formation. In the process, "ethics" could no longer refer primarily to a set of doctrines; it had to be considered as a complex set of relays between moral contents, aesthetic-affective styles, and public moods.⁵

Seperti yang ditegaskan Bennett, etika tidak terutama merujuk pada seperangkat norma atau aturan, tetapi sebuah interaksi yang kompleks antara ajaran atau nilai moral, gaya atau langgam afektif-estetis, dan suasana kebatinan publik (*public moods*). Kalau demikian, pelaksanaan hidup etis menjadi kompleks juga. Bennet menegaskan: "*If a set of moral principles is actually to be lived out, the right mood or landscape of affect has to be in place.*" Bennet menekankan penciptaan "suasana atau lanskap afeksi" (*the right mood or landscape of affect*) yang bersifat publik, yang ditularkan dan dipupuk dalam komunitas, termasuk komunitas akademis, sebagai langkah awal untuk membangun kehidupan etis. Sehubungan dengan kompleksitas hidup moral dan etika ini, identitas dan panggilan dosen, akademisi, termasuk guru besar, adalah sebagai pendidik, ilmuwan dan intelektual, dan tidak melulu berhubungan dengan produksi pengetahuan saja, tetapi juga mempertajam isi atau ajaran moralitas, menciptakan gaya estetis dan afektif untuk menjalankan moralitas itu, dan juga berpartisipasi dalam menciptakan disposisi publik. Semua ini dapat dilakukan lewat pengembangan nilai etis dalam pengajaran dan penelitian ilmiah, dalam interaksi akademis dan non-akademis, serta keteladanan dan partisipasi aktif dalam hidup publik demokratis. Singkatnya, panggilan para dosen dan akademisi bukanlah sekadar memproduksi pengetahuan dan menciptakan layanan atau paket pendidikan, melainkan ikut membangun fondasi hidup etis dalam konteks peradaban dan pertumbuhan kemanusiaan yang lebih luas.

⁵ Jane Bennett, *The Enchantment of Modern Life: Attachments, Crossings and Ethics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001); dikutip melalui Bennet, *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things* (Durham, NC: Duke University Press, 2010), 20.

Intelektual dan Kebijakan Tekno-moral

Krisis intelektualitas dan moralitas yang kita bahas di atas terjadi dalam konteks yang unik, karena berbarengan dengan perkembangan teknologi yang begitu masif dan cepat, yang akhir-akhir ini terutama ditandai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pelbagai bentuknya. Perkembangan teknologi yang fenomenal ini melahirkan sebuah tatanan global baru yang bersifat sosio-teknis (*global socio-technical order*), yang juga menjadi arena baru bagi para intelektual untuk memainkan peran yang baru dan kompleks pula, termasuk para intelektual di Indonesia.

Selama ini, kita lebih mengenal para akademisi yang terutama berkarya di bidang keilmuannya sendiri, termasuk karya-karya inovasi dan kreativitas yang sangat berpengaruh dalam transformasi masyarakat. Para peraih hadiah Nobel dalam bidang STEM dan ilmu sosial bisa menjadi contoh. Misalnya, peraih hadiah Nobel Kimia di tahun 2024 adalah tiga ilmuwan yang berperan dalam penemuan protein, yaitu David Baker dari University of Washington, Demis Hassabis dan John M. Jumper dari Google DeepMind, London. David Baker berhasil menemukan cara baru yang dulu dianggap mustahil untuk membangun jenis-jenis protein yang sama sekali baru, sedangkan Demis Hassabis dan John Jumper mengembangkan model AI untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang belum terpecahkan selama 50 tahun terakhir ini, yaitu memprediksi struktur protein yang kompleks. Penemuan-penemuan ini memiliki potensi untuk mengubah banyak hal dalam hidup manusia.

Ketiga ilmuwan ini mungkin termasuk dalam kategori "inteligensia teknis" (*technical intelligentsia*), sebuah konsep yang pernah dilontarkan oleh Alvin Gouldner beberapa dekade lalu. Bagi Gouldner, kaum inteligensia teknis ini merupakan sebuah "kelas baru" (*new class*) yang tumbuh dalam masyarakat kapitalis. Inteligensia teknis merupakan

kaum terdidik yang menyediakan kepakaran teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat kapitalis. Mereka adalah "pekerja yang memproduksi pengetahuan" (*knowledge workers*), bukan terutama intelektual dalam arti pemikir publik.⁶ Namun, kaum *technical intelligentsia* ini juga menghadapi gugatan terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan *artificial intelligence* saat ini, yang tidak hanya sangat pesat tetapi juga mengubah hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia dan semesta. Dalam konstelasi zaman seperti ini, terciptalah hubungan yang lebih rumit antara pelbagai disiplin ilmu teknik (*engineering*) dan tanggung jawab etis. Shannon Vallor, seorang filsuf, menegaskan perlunya kebijaksanaan tekno-moral (*technomoral wisdom*) di kalangan kaum intelektual dan ilmuwan. Yang dimaksud kebijaksanaan tekno-moral bukanlah sekadar integritas moral pribadi, atau keteladanan moral tradisional (misalnya berbasis *virtue ethics*), tetapi kemampuan membuat pilihan etis yang tepat di hadapan pilihan-pilihan teknologis yang dimungkinkan (*possible*), demi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.⁷

Kebijaksanaan tekno-moral ini sangat penting karena akhir-akhir ini muncul ketidakpercayaan publik pada sains teknologi dan perusahaan teknologi yang bekerja dengan algoritma yang tidak adil (*unfair algorithm*). Telah disadari adanya kesenjangan antara teknologi yang berkembang pesat dan maju, di satu pihak, dengan kualitas kehidupan yang justru menurun drastis di lain pihak. Bahkan terjadi fenomena aneh yang berlangsung di tengah kemajuan teknologi ini, yang disebut dengan "*ensbittification*", yaitu penurunan kualitas infrastruktur dan sarana-sarana dasariah untuk kesejahteraan warga. Sehubungan dengan hal ini, para peraih Nobel di bidang ekonomi tahun 2024, yaitu Daron Acemoglu

6 Gouldner, *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class* (London and New York, NY: Continuum, 1979).

7 Shannon Vallor, *The AI Mirror: How to Reclaim Our Humanity in an Age of Machine Thinking* (New York, NY: Oxford University Press, 2024).

dan rekannya, Simon Johnson (Massachusetts Institute of Technology) dan James A. Robinson (University of Chicago) mungkin termasuk dalam jenis intelektual yang memiliki peran publik politik yang lebih langsung dan menjadi suara kritis di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan terasa tak terkendali itu. Dalam buku *Why Nations Fail*, Acemoglu dan Robinson menemukan kenyataan penting mengenai peran institusi sosial demokratis dalam menciptakan kemakmuran yang lestari (*sustainable*) secara jangka panjang. Mereka membedakan institusi yang inklusif yang menghasilkan kemakmuran yang lebih merata dan lestari, dan institusi ekstraktif yang hanya menghasilkan keuntungan bagi para penguasa dalam jangka yang pendek. Dalam dinamika sejarah suatu masyarakat, sejauh sistem politiknya terus mendukung kepentingan para penguasa ini, tidak ada warga yang percaya bahwa akan terjadi reformasi sistem ekonomi sehingga tidak akan lahir juga pembaruan ekonomi dan kemakmuran. Dalam keadaan tertentu, situasi *status quo* ini tidak bisa dipertahankan karena warga menghendaki sistem baru yang lebih demokratis dan membawa kemakmuran.⁸

Acemoglu dan Robinson tidak hanya menerangkan perbedaan kemakmuran antarbangsa dan masyarakat, mengapa satu bangsa berhasil mencapai kemakmuran dan mengapa ada juga masyarakat yang gagal,⁹ melainkan juga mengkritik institusi yang ekstraktif, yang menghambat pertumbuhan dan kemakmuran dalam sistem yang tidak adil. Dalam karya yang lebih baru mengenai peran teknologi, *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*,¹⁰ Acemoglu, kali ini bersama Johnson, meneruskan argumen mengenai peran teknologi dalam menciptakan kemakmuran dan kemajuan ini. Teknologi tidak

8 Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty* (New York: Crown Business, 2012); <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2024/press-release/>

9 Acemoglu dan Robinson, *Why Nations Fail*.

10 Daron Acemoglu dan Simon Johnson, *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity* (New York: PublicAffairs, 2023).

berperan dalam ruang kosong dan independen. Tidak ada hubungan otomatis antara teknologi dan kemakmuran karena peran teknologi nyatanya dikendalikan oleh kelas yang berkuasa. Teknologi cenderung menciptakan kekayaan, martabat sosial, dan dominasi budaya dan kekuatan politik pada mereka yang sudah mengendalikan kuasa dalam masyarakat. Acemoglu dan Johnson membongkar optimisme modern mengenai peran teknologi. Kedua ahli ini menekankan peran kita untuk melakukan pilihan. Pilihan-pilihan kita mengenai teknologi mana yang akan kita kembangkan dan ke arah mana kita mengembangkannya akan sangat berpengaruh dalam perjalanan masyarakat. Pengembangan teknologi digital yang tidak diarahkan oleh pilihan-pilihan demokratis seperti sekarang ini hanya akan menghasilkan kekayaan dan kemakmuran bagi perusahaan teknologi besar dan mengirimkan jutaan orang lain kepada kemiskinan. Pengembangan teknologi harus diikuti oleh pilihan moral untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan baru, bukan untuk meminggirkan manusia melalui kerja otomatisasi dan sistem politik yang lumpuh dan stagnan. Acemoglu dan Johnson menegaskan: “*We need to use the tremendous digital advances of the last half century to create useful and empowering tools, and seize back control from a small elite of hubristic, messianic tech leaders pursuing their own interests.*” Simon Johnson juga mengkritik ketidakmampuan pemerintah untuk meregulasi teknologi. Sering kali pemerintah justru terpenjara dalam kekuatan lembaga-lembaga finansial dan tidak bisa melindungi kelas menengah.

Kebijaksanaan tekno-moral tentu tidak bisa lahir begitu saja. Dalam hal ini peran universitas sangat krusial dalam kurikulum untuk ilmu-ilmu teknik dan STEM (*science, technology, engineering, mathematics*) secara umum, yang sekarang cenderung *hyperspecialized*. Kehadiran ilmu humaniora juga sangat krusial dalam konstelasi baru ini. Apa jadinya bila para mahasiswa teknik, yang kelak akan menjadi pelaku dan penggerak kemajuan teknologi, tidak pernah mengenal

tradisi pemikiran etis besar yang selama ini telah menjadi penunjuk arah bagi keputusan-keputusan publik politik kita? Vallor menghargai gerakan “*AI for Social Good*,” yaitu gerakan untuk menggunakan AI demi kesejahteraan umat manusia (misalnya dalam memprediksi dan mengendalikan perubahan cuaca dan bencana alam, dalam membaca *big data* dalam bidang kesehatan).¹¹ Namun, Vallor juga mengkritik *AI for Social Good* karena hanya mengubah penggunaan teknologi AI ke tujuan dan arah yang baik, tetapi tidak mengubah keadaan yang lebih fundamental atau sebab-sebab yang lebih mendasar. *AI for Social Good* tetap menggunakan AI sebagai alat untuk “mengawasi, menganalisis, memprediksi, mengidentifikasi, dan memetakan fenomena dan manusia (*surveil, analyze, predict, identify, classify, and map things and people*).”¹² AI dipakai untuk memprediksi bencana banjir, tetapi belum dipakai untuk mengkritisi kebijakan publik dalam bidang lingkungan. Semua jenis penggunaan AI ini tentu saja baik dan berguna, tetapi, menurut Vallor, hanya meneruskan apa yang telah kita lakukan dengan teknologi informasi selama ini dengan cara yang lebih baik saja. Penggunaan AI seperti ini tidak menuntut perubahan-perubahan struktural pada sistem dan institusi yang melahirkan keburukan dan persoalan yang ada, juga tidak menentang atau mengubah bias-bias sosial dan pengelompokan sosial yang melahirkan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat yang menghasilkan AI itu.¹³ Namun demikian, Vallor menegaskan, masalah utamanya bukan terletak pada AI sebagai teknologi, melainkan ketidakmauan kita untuk mengambil jarak dengan teknologi dan melakukan evaluasi terhadap pola-pola yang dihasilkan oleh teknologi itu.

Sikap yang dibutuhkan dalam konteks seperti ini adalah *independent thinking* dan *critical thinking* sebagai manifestasi baru dari

11 Mengenai *AI for Social Good*, lihat misalnya Rahul Doehia, *AI for Social Good: Using Artificial Intelligence to Save the World* (Hoboken, NJ: Wiley, 2024).

12 Vallor, *The AI Mirror*, 182.

13 Vallor, *The AI Mirror*, 182-183.

sapere aude (berani berpikir sendiri) yang telah menjadi semboyan Zaman Pencerahan. Selain itu dibutuhkan juga pembaruan moralitas dan etika, bukan berorientasi pada inovasi belaka, tetapi juga etika yang berbasis pada nilai kepedulian, memelihara, dan menyembuhkan (*ethics of care, restoration and repair*). Nilai-nilai ini penting karena mentalitas utama dalam kultur digital sekarang adalah "*disposability, replaceability, speed, scale, and frictionless ease*." Kita tidak perlu memeluk sikap pesimis terhadap teknologi (*technopessimism*), tetapi memang diperlukan sikap kritis dan resisten yang rasional dan sehat terhadap teknologi. Dalam hal ini Vallor menelusuri pandangan Plato dan Aristoteles yang tidak menghargai profesi mekanis atau tukang karena pekerjaan ini lebih berhubungan dengan tugas melayani dan memperhatikan orang lain (*the role of serving and caring for others*). Tentu saja pandangan Plato dan Aristoteles ini harus dikritik di zaman sekarang, karena konsepsi yang sempit mengenai "*wisdom*" atau orang bijak yang pantas jadi warga negara. Tetapi, poinnya tetap benar yaitu mengenai keterhubungan erat antara teknologi, pelayanan dan perhatian pada warga.¹⁴

Catatan Akhir

Saya ingin menutup tulisan ini dengan mengapresiasi Rm. Indra Sanjaya, dosen senior saya di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma yang berulang tahun ke-65 dan memasuki purnakarya. Saya adalah mahasiswa angkatan pertama di Fakultas Teologi yang diajar oleh Rm. Indra sesudah beliau lulus dari studi di Roma di tahun 2000-an. Kami sangat menikmati keseriusan dan keterbukaan ilmiah Rm. Indra. Sepanjang karier dan panggilannya sebagai dosen, Rm. Indra menekuni studi Kitab Suci, khususnya Perjanjian Lama. Tradisi Kebijaksanaan (*wisdom tradition*) telah mewarnai karya dan hidup Rm. Indra, dan sangat relevan untuk menerangi dan menginspirasi pergulatan kontemporer

14 Vallor, *The AI Mirror*, 191.

mengenai kebijaksanaan dalam pelbagai dimensi dan bentuknya, termasuk di dunia akademis dalam tantangan baru.

Di hadapan tantangan krisis intelektualitas atau kecendekiawanan dan perkembangan teknologi AI, tradisi kebijaksanaan mengingatkan kita untuk terus mencari kebijaksanaan yang lebih autentik dan substantif. AI telah menggoda kita sebagai substitusi kebijaksanaan. Para akademisi yang mengejar gelar "kebijaksanaan" yang abal-abal dengan langkah-langkah yang tidak etis akan lebih mudah tergoda dan terjerumus dalam pragmatisme keilmuan yang difasilitasi oleh AI. Dalam hal ini, semoga kita ingat bahwa pertaruhannya sungguh lebih serius dan mendalam, yaitu manusia yang berpikir dan menjadi bijak. B. F. Skinner, psikolog ternasyhur dari Harvard, pernah mengatakan di tahun 1969 demikian: "Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah apakah mesin-mesin itu sungguh berpikir, melainkan apakah manusia itu sendiri berpikir. Misteri yang menyelimuti mesin yang berpikir sebenarnya sudah menyelimuti manusia yang berpikir" (*The real question is not whether machines think but whether men do. The mystery which surrounds a thinking machine already surrounds a thinking man*).¹⁵ Kutipan yang sudah berumur lebih dari setengah abad ini sekarang begitu sering ditampilkan kembali, tentu karena terdengar begitu profetis di zaman ketika kebijaksanaan dan pemikiran manusia, serta "*the thinking man*" itu sendiri, berada dalam bahaya yang lebih nyata di hadapan perkembangan AI.

Terima kasih Rm. Indra atas persahabatan, pelayanan, inspirasi, dan eksplorasi kebijaksanaan selama ini di Fakultas Teologi. Selamat memasuki purnakarya dan semoga tak henti menebarkan kebijaksanaan.

15 B. F. Skinner, *Contingencies of Reinforcement: A Theoretical Analysis* (New York: Appleton-century-crofts, 1969).

Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron, dan James A. Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business, 2012.
- Acemoglu, Daron, dan Simon Johnson. *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*. New York: PublicAffairs, 2023.
- Bennett, Jane. *The Enchantment of Modern Life: Attachments, Crossings and Ethic*s. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
- Bennett, Jane. *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Durham, NC: Duke University Press, 2010.
- Dodhia, Rahul. *AI for Social Good: Using Artificial Intelligence to Save the World*. Hoboken, NJ: Wiley, 2024.
- Girling, *Corruption, Capitalism, and Democracy*. London and New York: Routledge, 1997.
- Giroux, Henry A. *Neoliberalism's War on Higher Education*. Roseville, MN: Between the Lines, 2014.
- Gouldner, Alvin. *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*. London and New York, NY: Continuum, 1979.
- Lombard, Denis. *Nusa Jawa: Silang Budaya I*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Skinner, B. F. *Contingencies of Reinforcement: A Theoretical Analysis*. New York: Appleton-century-crofts, 1969.
- Vallor, Shannon. *The AI Mirror: How to Reclaim Our Humanity in an Age of Machine Thinking*. New York, NY: Oxford University Press, 2024.

Rekonstruksi Sejarah: Menemukan Pesan Pembebasan Bagi Perempuan dari Teks-Teks Dominatif Alkitab dalam Pemikiran Elisabeth Schüssler Fiorenza

Leonardus Tri Purnanto & Y.B. Prasetyantha

Pendahuluan

Elisabeth Schüssler Fiorenza pernah menyebutkan bahwa perempuan adalah *the silenced majority* di dalam Gereja.¹ Alasan mendasar dari pernyataan ini adalah suara perempuan hampir tidak pernah terdengar dalam diskursus teologi dan pengambilan keputusan-keputusan Gereja. Situasi keterbungkaman itu bukan didasarkan pada ketidakmampuan perempuan dalam berteologi. Akan tetapi, hal itu kiranya disebabkan oleh kondisi di mana perempuan berada di dalam struktur dominasi patriarki Gereja yang membuatnya mengalami keterbatasan untuk bersuara.

Banyak teolog feminis berpendapat bahwa dominasi patriarki Gereja mendapatkan legitimasinya dari Alkitab.² Teks-teks Alkitab banyak yang bias gender dan bersifat androsentris sehingga secara tidak langsung telah menomorduakan perempuan misalnya Tit. 2:3-5, 1Kor.

1 Elisabeth S. Fiorenza, "Breaking the Silence-Becoming Visible," *Concilium* 182 (1985): 3.

2 Anne M. Clifford, *Memperkenalkan Teologi Feminis*, diterjemahkan dari *Introducing Feminist Theology* oleh Yusuf M. Florisan (Mauere: Ledalero, 2002), 52.